

# Proyek Skema PINA Rp136,5 Triliun Siap Digelar

PEMERINTAH akan menawarkan 13 proyek infrastruktur melalui skema pembiayaan investasi non-APBN (PINA) senilai Rp136,5 triliun. CEO PINA Ekoputro Adijayanto mengatakan melalui PINA, pemerintah mendorong agar pembiayaan infrastruktur ke depan tidak hanya bersumber dari APBN, tapi juga dari pihak swasta.

“Pihak lain di sini ialah swasta dan pendekatan yang dilakukan ialah berbasis ekuiti dan secara *business to business*,” ujar Ekoputro se usai pemaparan dalam Infra-

structure Insight Forum 2017 di Jakarta, Rabu (22/11).

Syarat proyek masuk kategori PINA ialah bila dalam proyeksinya mampu menghasilkan tingkat pengembalian investasi (IRR) di atas 13%. Bila di bawah itu, skema pembiayaannya melalui skema *public private partnership* (PPP).

Sebagian besar dari 13 proyek yang ditawarkan ialah jalan tol dan pembangkit listrik. Lainnya berupa turut serta mengembangkan pelabuhan terintegrasi pariwisata Labuan

Bajo, juga pesawat buatan Indonesia bertempat duduk penumpang, 80 yakni R80.

Untuk Labuan Bajo, sebuah perusahaan swasta pemilik lahan seluas 500 ha di wilayah Flores, yakni Flores Prosperindo, membutuhkan investasi dalam bentuk ekuitas. Mereka tidak hanya membangun hotel, tapi juga pelabuhan marina dan bandara.

“Untuk pesawat R80, saat ini dana *crowd-fund* sudah Rp 5 miliar. Kami mau dorong di PINA. Akan ada penandatanganan (MoU) di kantor R80. Investasi mereka untuk bangun

pabrik dan rekayasa *engineering* sekitar US\$1,5 miliar, tapi bertahap. Mungkin pertama US\$500 juta,” ungkap Ekoputro.

Sebelumnya, tiga proyek yang difasilitasi penyelesaiannya ialah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan total nilai proyek sebesar Rp2,1 triliun. Kemudian PT Waskita Toll Road untuk total proyek senilai Rp69,74 triliun dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Meulaboh. Total nilai investasi ketiga proyek tersebut mencapai Rp79 triliun. (Try/E-1)